

**Judul** : Fase Pendaftaran Dimulai  
**Tanggal** : Kamis, 20 April 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

## Fase Pendaftaran Dimulai

Para bakal calon anggota legislatif diminta segera menyiapkan dokumen persyaratan. Batas akhir pengunggahan dokumen ke Silon KPU pada 14 Mei 2023, pukul 23.59.

**JAKARTA, KOMPAS** — Partai politik peserta Pemilu 2024 sudah bisa menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Pencalonan atau Silon meski masa pendaftaran baru resmi dibuka pada 1-14 Mei mendatang. Akses ke sistem itu memang sengaja dibuka lebih awal agar tersedia cukup waktu bagi partai untuk menyerahkan seluruh dokumen persyaratan.

KPU mulai membuka akses ke Silon, Rabu (19/4/2023). Dibukanya akses ke Silon ini setelah dua rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang terkait pencalonan anggota DPR, DPRD, serta DPD diundangkan, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2023 serta PKPU No 11/2023.

"Setelah terbitnya kedua PKPU itu, KPU hari ini mulai mengaktifkan Sipol untuk partai politik," ujar anggota KPU, Idham Holik, Rabu (19/4), di Jakarta.

Dalam PKPU itu disebutkan, ada sejumlah dokumen yang harus diserahkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Ini antara lain fotokopi ijazah yang dilegalisasi dan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menerangkan tak pernah dipidana dengan

ancaman lima tahun penjara.

Idham mengingatkan, seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah ke Silon maksimal pada 14 Mei 2023 pukul 23.59. "Bakal caleg sebaiknya segera mengurus dokumen persyaratan sejak hari kerja pertama pas-calibur bersama Lebaran pada Rabu (26/4) mengingat pengurusan dokumen membutuhkan waktu yang tidak pendek," ujarnya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, jauh-jauh hari pihaknya sudah menyosialisasikan sekaligus melatih pengurus partai di daerah hingga pusat memasukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan melalui Silon. Hal tersebut dinilai penting karena pendaftaran bacaleg diorganisasikan oleh parpol, bukan caleg. Karena itu, para pengurus bertanggung jawab memastikan kelengkapan persyaratan dari setiap bacaleg. "Jadi, kita harapkan ketika semua bacaleg PDI-P didaftarkan nanti, insya Allah tidak ada masalah dalam hal administrasi," ujarnya.

### Waktu mepet

Adapun Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menilai, penerbitan PKPU pencalonan terlalu mepet dengan tahapan pendaftar-

an bacaleg. Parpol beserta bacaleg bisa kesulitan memenuhi seluruh persyaratan, apalagi instansi pemerintahan libur Lebaran selama seminggu.

Partai Buruh, menurut dia, sudah menginstruksikan bacaleg mengurus dokumen persyaratan sebelum terbitnya PKPU pencalonan dengan mengacu pada PKPU pencalonan yang berlaku untuk Pemilu 2019. Namun, tidak semua bacaleg mengikutinya karena mereka memilih menunggu PKPU pencalonan yang baru diterbitkan KPU. PKPU ini dinantikan karena mereka khawatir ada perbedaan dokumen persyaratan antara yang berlaku di Pemilu 2019 dan pada Pemilu 2024.

Di sisi lain parpol juga membutuhkan waktu lama untuk mengunggah dokumen persyaratan ke Sipol. Hal itu karena data di partai tidak bisa langsung dilakukan migrasi ke Silon. Sebab, sistemnya berbeda.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tak adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu seharusnya membuat parpol dan bacaleg lebih siap dalam menyiapkan dokumen persyaratan. Mereka bisa merujuk aturan pada Pemilu 2019 karena sebagian

besar syaratnya masih sama.

### Dinamika pilpres

Sementara itu, terkait pencalonan presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretaris Jenderal PDI-P Has-to Kristiyanto menegaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menunjuk figur tertentu menjadi capres PDI-P tak semata didasarkan pada aspek elektabilitas. Bukan juga didasarkan pada pencitraan yang dibangun oleh tokoh.

"Variabel kepemimpinan itu banyak," ujar Has-to sesuai melepas keberangkatan pemudik bareng PDI-P di Jakarta, Rabu (19/4).

Variabel kepemimpinan di antaranya visi tokoh terkait bangsa pada masa depan. Selain itu, sisi ideologi tokoh. "Jadi, yang dicari dan dipersiapkan Bu Mega itu pemimpin yang kokoh secara ideologi, yang visioner, yang mumpuni, yang punya kemampuan profesional, tetapi sekaligus memahami kehendak rakyat," katanya.

Namun, Has-to belum bisa menyebutkan kapan Megawati memutuskan dan mengumumkan capres PDI-P. Ia hanya menyebutkan bahwa PDI-P bakal menggelar sejumlah acara besar pada Juni mendatang.

"Misalnya, 1 Juni lahirnya

Pancasila, 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno, dan 24 Juni kami mengadakan puncak konsolidasi dan puncak peringatan bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Senayan," ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan pernah bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikh. Syaikh disebut mengunjunginya, 15 April lalu. Diskusi membahas berbagai hal, seperti Pemilu 2024 dan kepastian pemerintah mengawal pelaksanaannya. Sementara pembicaraan tentang capres-cawapres, menurut Mahfud, hanya sekilas.

Pada Selasa (18/4), Syaikh menyampaikan telah bersilaturahmi dengan banyak tokoh untuk mencari figur cawapres pendamping Anies Baswedan. Salah satunya Mahfud MD.

Silaturahmi Syaikh berlanjut kemarin. Ia menemui Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta. Sesuai pertemuan, Syaikh menyampaikan, kedua parpol saling menghormati keputusan masing-masing terkait koalisi. Hingga kini, PPP dan PKS tergabung dalam koalisi parpol berbeda. (SYA/NAD/NIA/BOW)